

KERTAS KERJA EVALUASI BIRO HUKUM SETDA PROVINSI NTB

kinerja-Output-Penganggaran

NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	IKU/Bukan Iku	NO	PROGRAM			KEGIATAN			ANGGARAN
				URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	
1	Persentase Produk Hukum Daerah yang berkualitas	Persentase Produk Hukum Daerah yang berkualitas	1	Facilitasi Produk Hukum Daerah	Meningkatnya fasilitas dan Evaluasi produk hukum daerah Provinsi	Persentase Penyusunan Produk Hukum yang berkualitas	Facilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Terbentuknya Produk Hukum Daerah Provinsi	Terlaksananya Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Daerah	384.747.300
2	Persentase Penyelesaian Kasus-kasus Hukum Daerah	Persentase Penyelesaian Kasus-kasus Hukum Daerah	2		Meningkatnya fasilitas dan Evaluasi produk hukum daerah Kab/Kota			Terbentuknya Produk Hukum Daerah Kab/Kota		
3	Persentase Produk Hukum yang dapat diakses oleh Masyarakat di JDIH, Media Sosial yang berkualitas	Persentase Produk Hukum yang dapat diakses oleh Masyarakat di JDIH, Media Sosial yang berkualitas	3		Meningkatnya Penyelesaian penanganan kasus Litigasi, Non Litigasi dan HAM		Facilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya Penanganan Kasus-kasus Hukum Pemerintah Daerah (Pemda) melalui proses Litigasi di Tingkat pertama	Terlaksananya Penanganan Kasus-kasus Hukum Pemerintah Daerah (Pemda) melalui proses Litigasi di Tingkat Banding	140.009.000
4			4		Meningkatnya akses terhadap produk hukum Daerah			Terlaksananya Penanganan Kasus-kasus Hukum non Litigasi dan HAM melalui Proses Mediasi	Tersedianya Produk Hukum yang dapat diakses melalui website JDIH dan	Rp524.756.300
				JUMLAH						

Mataran, Agustus 2022
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB

H. RUSLAN ABDUL GANI, SH, MH.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651231 199303 1 135